

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan metode untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Dalam mewujudkan kebijakan publik, terdapat dua opsi yang tersedia, yaitu mengimplementasikan secara langsung dalam bentuk program-program atau melalui penyusunan kebijakan lanjutan dari kebijakan publik tersebut. (R. Nugroho, 2021)

Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi geografis, perubahan tata guna lahan, serta tingginya curah hujan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya banjir. Banjir tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aktivitas sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan bencana yang efektif melalui peran pemerintah daerah, khususnya lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

Menurut BNPB Banjir merupakan aliran air permukaan yang tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga menyebabkan genangan air dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana paling dominan di Indonesia, dengan rata – rata 1.500 kejadian pertahun yang mempengaruhi jutaan penduduk terutama di wilayah padat permukiman seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, menyebabkan kerugian

infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan permukiman, serta korban jiwa yang mencapai ratusan orang setiap tahunnya (BNPB 2024)

Kecamatan Medan Marelan merupakan wilayah di Kota Medan yang menjadi salah satu wilayah yang sering terkena bencana banjir yang terus berulang setiap tahunnya hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang dilewati beberapa sungai seperti sungai deli, sungai bedarak, dan sungai belawan, Banjir yang terjadi di Kecamatan Medan Marelan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aktivitas manusia, seperti pembangunan permukiman yang tidak terencana, penyempitan saluran drainase, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan banjir menjadi permasalahan yang terjadi hampir setiap tahun dan menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat.

Adapun Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang penanggulangan bencana, bahwa wilayah Kota Medan secara geografis yang memungkinkan sebagai daerah rawan terkena bencana alam, bencana non alam dari berbagai aktivitas manusia termasuk didalamnya bencana akibat kegagalan teknologi, pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, serta bencana sosial yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bahkan korban jiwa. Pemerintah kota medan mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak – hak dasar dan perlindungan secara nyata bagi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Peraturan Pemerintah RI Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan turunannya seperti peraturan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia

membentuk struktur kelembagaan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ditingkat Provinsi dan Kota untuk mengimplementasikan kebijakan mitigasi secara desentralisasi, termasuk tahap pra – bencana saat bencana dan pasca – bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD berperan dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana yang meliputi tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dan perbaikan. Implementasi program tersebut menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana diatur dalam PERPRES NOMOR 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044, RIPB ini sebagai pedoman untuk mengatur tugas dan fungsi BPBD dalam merancang, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program penanggulangan bencana banjir.

**Tabel 1. 1 Data Lokasi Kejadian Dan Jumlah Terdampak Banjir
Dikecamatan Medan Marelان 2024**

Lokasi Kejadian 2024	Data dan Dampak 2024
1. Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelان	Terdampak: 50 Rumah/ 65 KK/ 300 Jiwa
2. Lingkungan 1, 3, dan 7 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان	Terdampak: 150 rumah/ 160 KK/ 365 Jiwa

Sumber; bpbdkotamedan

Berdasarkan sumber berita BPBD Kota Medan bahwa ditahun 2024 banjir menggenangi beberapa wilayah Di Kecamatan Medan Marelan dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 sentimeter. Dari sumber tersebut data dan dampak akibat curah hujan tinggi mengakibatkan 200 Rumah warga yang turut terimbas akibat banjir

**Tabel 1. 2 Data Lokasi Kejadian Dan Jumlah Terdampak Banjir
Dikecamatan Medan Marelan 2025**

Lokasi Kejadian 2025	Data dan Dampak 2025
1. Lingkungan IX Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan	Terdampak: 296 Rumah/ 180 KK/ 600 Jiwa
2. Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan	Terdampak; 485KK/ 1.460 Jiwa

Sumber; pusdalopsbpdprov.sumut

Berdasarkan sumber berita Pusdalopsbpdprov.sumut bahwasannya pada bulan januari 2025 telah terjadi banjir di lingkungan IX Kelurahan terjun Kecamatan Medan Marelan dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi sehingga yang menggenangi permukiman warga yang mengakibatkan 296 rumah warga yang terkena imbas genangan air.

Tidak hanya di kelurahan terjun dibeberapa kelurahan juga terkena dampak banjir dikecamatan medan marelan, Pada bulan Agustus 2025 peneliti melakukan observasi lapangan dan melihat lokasi yang terkena dampak banjir Di Marelan Pasar I Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan, Pasar II dan III Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Peneliti menemukan

beberapa hal pemicu terjadinya banjir di daerah tersebut dikarenakan curah hujan yang tinggi kemudian selokan atau drainase yang minim sehingga peneliti melihat banjir 3-4 cm di beberapa kelurahan.

Pada bulan November 2025 Wilayah Kota Medan kembali lagi terkena bencana banjir, tepatnya di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan yang paling parah terdampak bencana banjir. Banjir besar yang datang pada Rabu malam disebut berasal dari intensitas hujan ekstrem dan meluapnya sungai Bedera, Sungai Deli, dan banjir kiriman dari wilayah Titi Papan, ribuan warga harus mengungsi dikarenakan rumah masyarakat setempat bahkan tenggelam. Tidak hanya logistik yang menipis, ketiadaan listrik membuat kulkas dan pompa air tidak berfungsi. Sementara kebutuhan obat-obatan untuk lansia dan anak-anak turut menjadi keluhan utama. Jaringan telekomunikasi Telkomsel yang disebut padam sejak hari kedua semakin memperparah situasi, warga tak bisa menghubungi keluarga maupun layanan darurat. (Sumber; <https://medan.tribunnews.com/>)

Data statistik dari BPBD Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa banjir di Kecamatan Medan Marelan terjadi rata – rata 3 – 5 kali pertahun dengan intensitas yang meningkat seiring urbanisasi pesat yang mencapai tingkat pertumbuhan 4-5% per tahun dan pengurangan area resapan air akibat pembangunan perumahan dibantaran daerah aliran sungai (DAS) yang tidak mempertimbangkan aspek hidrologi. (BPBD Sumatera Utara, 2022).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, BPBD Kota Medan telah melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana banjir, seperti sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, pembentukan relawan siaga bencana, koordinasi dengan instansi terkait, serta pelaksanaan evakuasi ketika terjadi banjir.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak, seperti pemerintah kecamatan, kelurahan, dinas bws, serta masyarakat.

Namun terdapat kesenjangan antara tujuan program BPBD dalam penanggulangan banjir dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwasannya banjir masih terus terjadi setiap tahun. Oleh karena itu kesenjangan ini yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai implementasi program BPBD Dalam Mengatasi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Marelan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam terkait judul skripsi peneliti yang berjudul “ **Implementasi Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengatasi Bencana Banjir Di kecamatan Medan Marelan** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti membuat Rumusan masalah terkait;

1. Bagaimana Implementasi Program BPBD Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program BPBD Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus pada menganalisis Implementasi Program BPBD Dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan yang bertujuan untuk mengetahui;

1. Bagaimana Implementasi program BPBD dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan BPBD dalam mengatasi Penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BPBD Kota Medan dalam mengatasi bencana banjir di Kecamatan Medan Marelan
2. Mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti dan juga Pemerintah Kota Medan serta masyarakat di Kecamatan Medan Marelan terhadap penanggulangan bencana banjir. Adapun manfaatnya antara lain;

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian dengan menerapkan teori – teori yang sudah diajarkan

selama perkuliahan terkhusus teori implementasi kebijakan public, dengan menerapkan teori ini peneliti menambah wawasan dalam penelitian judul skripsinya yang berjudul “ Implementasi Program BPBD Dalam Mengatasi Bencana Banjir Dikecamatan Medan Marelan

b) Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan BPBD dalam mengurangi dampak banjir di Kecamatan Medan Marelan dimasa mendatang. Dan penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi valid bagi masyarakat dan media mengenai upaya penanggulangan bencana banjir, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan public terhadap kinerja pemerintah.